



# JURNAL BASICEDU

Volume 8 Nomor 2 Tahun 2024 Halaman 1298 - 1307

Research & Learning in Elementary Education

<https://jbasic.org/index.php/basicedu>



## Filsafat Ilmu sebagai Pengembangan Nilai Pancasila dalam Mengatasi Krisis Kebangsaan

**Muhammad Awin Alaby**

Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan Kusumanegara Jakarta, Indonesia

E-mail: [alaby156@gmail.com](mailto:alaby156@gmail.com)

---

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana filsafat ilmu sebagai pengembangan nilai pancasila dalam mengatasi krisis kebangsaan. Filsafat ilmu begitu penting digunakan secara ilmiah untuk mengatasi krisis kebangsaan yang bermuara pada melemahnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila. Metode penelitian ini adalah *Library Research* Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Metode ini digunakan peneliti agar masalah yang diangkat oleh peneliti dapat teruraikan lebih dalam dan menjadi acuan teori bagi peneliti lain dalam menganalisis data yang bersifat tidak langsung. Teknik penelitian ini didasari dengan kajian literatur. Hasil penelitian ini menemukan bahwa krisis kebangsaan yang ditandai dengan melemahnya pemahaman dan penghayatan masyarakat dapat diatasi dengan melakukan pengembangan nilai pancasila dan perbaikan untuk mengembalikan fungsinya serta mengaktualisasikan kembali nilai-nilai Pancasila yang memiliki ilmu pengetahuan dan hakekat pengetahuan yang dapat dikaji melalui filsafat ilmu, baik secara ontologi, epistemologi, dan secara aksiologi.

**Kata Kunci** : Filsafat ilmu, Nilai-nilai Pancasila, Krisis Kebangsaan.

### Abstract

*This research aims to find out how the philosophy of science develops Pancasila values in overcoming the national crisis. It is very important for the philosophy of science to be used scientifically to overcome the national crisis which leads to the weakening of society's understanding of the values of Pancasila. This research method is Library Research. This research uses descriptive qualitative methods. This method is used by researchers so that the problems raised by researchers can be explained more deeply and become a theoretical reference for other researchers in analyzing indirect data. This research technique is based on literature review. The results of this research found that the national crisis which is marked by weakening understanding and appreciation of society can be overcome by developing Pancasila values and improvements to restore its function and re-actualize Pancasila values which have science and the essence of knowledge which can be studied through the philosophy of science. Both ontology, epistemology and axiology.*

**Keywords:** *The Philosophy Of Science, Pancasila values, National Crisis.*

---

Copyright (c) 2024 Muhammad Awin Alaby

✉ Corresponding author :

Email : [alaby156@gmail.com](mailto:alaby156@gmail.com)

DOI : <https://doi.org/10.31004/basicedu.v8i2.7322>

ISSN 2580-3735 (Media Cetak)

ISSN 2580-1147 (Media Online)

## PENDAHULUAN

Masalah kebangsaan dan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam proses kebangsaan Indonesia masih terus berlanjut hingga saat ini dengan berbagai relasi kekuasaan dan permasalahannya. Beberapa tahun terakhir terjadi krisis kebangsaan yang mengalami tantangan yang tidak ringan, yang tampak pada munculnya peristiwa-peristiwa kerusuhan yang tak sedikit. Perbedaan aliran keagamaan dan kepentingan politik dapat menyulut perpecahan yang pada akhirnya rasa persatuan semakin lenyap. (Sutrisno, 2006;142).

Permasalahan aktual yang lain ialah merebaknya praktek korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara dan pejabat daerah membuat peradaban bangsa Indonesia semakin runtuh. dengan terkuaknya fakta korupsi yang dilakukan penyelenggara negara memang bukanlah hal baru. Berdasarkan data di situs [kpk.go.id](http://kpk.go.id), sejak tahun 2004 hingga 3 Januari 2022 tidak kurang dari 22 Gubernur dan 148 bupati/wali kota telah ditindak oleh KPK ( Komisi Pemberantasan Korupsi ). Jumlah itu tentu bisa lebih besar jika digabungkan dengan data dari Kejaksaan dan Kepolisian. ICW ( *Indonesian Corruption Watch* ) mencatat, sepanjang tahun 2010 – Juni 2018 tak kurang dari 253 kepala daerah ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh aparat penegak hukum. (ICW, n.d.).

Ketika korupsi menjadi budaya bangsa Indonesia, maka negara Indonesia akan mengalami kesulitan untuk maju dan bersaing dengan negara lain.. Meningkatnya korupsi di Indonesia disebabkan oleh ketidakmampuan penyelenggara negara mengamalkan nilai - nilai Pancasila . Bahkan dikalangan mereka banyak yang mengabaikan dan acuh tak acuh dengan nilai pancasila. Pancasila hanya digunakan sebagai identitas dan tidak diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.

Untuk mengatasi persoalan bangsa, perlu dilakukan pengembangan nilai Pancasila yang Saat ini sudah berada pada level mengkhawatirkan. Kejujuran, kebenaran, keadilan, kebaikan, dan kasih sayang telah digantikan oleh penyimpangan, penipuan, korupsi, penindasan, saling menjegal, dan saling menyakiti. Untuk memahami dinamika fenomena krisis kebangsaan ini, perlu dilakukan pemulihan semangat mengembangkan ilmu pengetahuan dan tujuan mulia dari pada nilai-nilai Pancasila melalui filsafat ilmu, sehingga ilmu yang berkembang tidak menjadi senjata makan tuan bagi kehidupan manusia . sementara salah satu tujuan filsafat ilmu dalam mengembangkan nilai-nilai Pancasila adalah dengan menciptakan pandangan hidup yang menekankan bahwa ilmu pengetahuan adalah alat, bukan tujuan . Filsafat dan ilmu pengetahuan saling terkait dan sangat berpengaruh besar terhadap segala sesuatu, pengaruh tersebut dapat membawa perubahan terhadap peradaban manusia ke taraf yang lebih maju (Ahmad Tafsir, 2005) Dalam konteks seperti itu, sudah seyogyanya diperlukan pandangan komprehensif terhadap nilai - nilai yang berkembang dalam masyarakat.

## METODE

Metode penelitian ini adalah penelitian kepustakaan . Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode ini digunakan peneliti untuk menjelaskan lebih detail permasalahan yang diangkat peneliti dan memberikan acuan teoritis bagi peneliti lain ketika menganalisis data tidak langsung. (Moleong, 2007) Analisis data yang digunakan peneliti ini dilakukan sebelum observasi lapangan. Analisis yang digunakan peneliti adalah analisis domain yang peneliti buat berdasarkan konsep dasar umum objek kajian dan metode bagaimana situasi sosial membawa perubahan. Sehingga permasalahan yang terjadi dari awal hingga akhir tidak banyak berubah. Metode penelitian ini didasarkan pada tinjauan pustaka dari berbagai sumber untuk lebih mengkaji dan memahami penelitian yang sedang dipertimbangkan oleh peneliti (Sugiyono, 2018).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Keterkaitan Filsafat Ilmu Dengan Nilai –Nilai Pancasila

Filsafat ilmu merupakan segala pertimbangan reflektif terhadap berbagai persoalan mengenai segala sesuatu yang menyangkut tegaknya ilmu pengetahuan dan hubungan ilmu pengetahuan dari segala sisi kehidupan manusia. Filsafat ilmu merupakan satu bidang pengetahuan campuran yang eksistensi dan pemekarannya bergantung pada hubungan timbal-balik dan saling-pengaruh antara filsafat dan ilmu. Robert Ackermann mendefinisikan filsafat ilmu adalah sebuah tinjauan kritis tentang pendapat-pendapat ilmiah dewasa ini dengan perbandingan terhadap pendapat-pendapat lampau yang telah dibuktikan atau dalam kerangka ukuran-ukuran yang dikembangkan dari pendapat-pendapat demikian itu. Filsafat ilmu demikian jelas bukan suatu cabang ilmu yang bebas dari praktek ilmiah senyatanya (Gie, 2007:57).

Rudolf Carnap memakai istilah *science of science* dan memberikan definisi *the analysis and description of science from various points of view, including logic, methodology, sociology and history of science*. Analisis dan deskripsi tentang ilmu sebagai sumber informasi ternyata ada kaitannya dengan Pancasila termasuk logika, metodologi, sosiologi dan sejarah ilmu. Pancasila sebagai pedoman hidup juga menyimpan segudang informasi yang patut diciptakan melalui ajaran penalaran ilmu pengetahuan yang secara logis mempunyai nilai - nilai substansi positif dalam membentuk watak dan karakter negara Indonesia.

Di sisi lain, ketika berbicara tentang filsafat, ada dua hal yang patut diperhatikan: pertama, filsafat sebagai metode dan kedua filsafat sebagai suatu pandangan (Hadi, 1994:19). Selanjutnya disini Filsafat sebagai suatu ilmu pengetahuan akan dijadikan sebagai pedoman hidup. Terkait dengan Pancasila, Pancasila sebagai pedoman hidup tentunya mempunyai nilai-nilai filosofis yang terkandung di dalamnya, dan memang Pancasila memuat suatu ilmu. Secara mendalam, Pancasila bisa jadi merupakan kerangka nilai-nilai ideologis. Artinya didalam nya mengandung nilai luhur, nilai dasar, nilai instrumental, nilai praksis, dan nilai teknis. Agar ia dapat menjadi ideologi bangsa dan negara Indonesia yang lestari akan tetapi juga berkembang dinamis, nilai luhur dan nilai dasarnya harus dapat bersifat tetap, sementara nilai instrumentalnya harus semakin dapat direformasi dengan perkembangan tuntutan jaman.

Di samping itu, Pancasila mampu di jadikan pangkal sudut pandang dalam mengembangkan ilmu pengetahuan (*science of knowledge*) yang dalam karya - karya selanjutnya ditunjukkan aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologinya sebagai *raison d'être* bagi Pancasila sebagai suatu faham atau aliran filsafati (Wibisono Siswomihardjo, 1995:126).

Pancasila sejak dahulu dijadikan sebagai *weltanschauung* atau pandangan hidup negara Indonesia, sekaligus sebagai pedoman dasar negara. Dengan demikian, substansi Pancasila erat kaitannya dengan nilai-nilai dasar usaha kemasyarakatan. Bila Pancasila diucapkan sebagai pedoman hidup, berarti Pancasila sendiri mempunyai ilmu pengetahuan yang sungguh luar biasa berharganya bagi manusia Indonesia sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila yang dipelajari secara ilmiah adalah satu objek pembahasan di mana secara umum Pancasila merupakan hasil budaya bangsa Indonesia (Kaelan, 2014:13).

Filsafat ilmu juga tidak dapat dilepaskan dengan Pancasila sebagai sebuah ilmu (*science*). Anton Bakker dalam analisisnya menyatakan secara tegas bahwa Pancasila dapat berperan selaku *framework* di mana sekian ilmu serentak bekerja secara interdisipliner. Di sini kapasitas Pancasila dapat dieksplorasi ke dalam ranah filsafat ilmu (*Philosophy of Science*) berkaitan dengan asas ontologis, epistemologis dan aksiologis (Sutrisno, 2006:124).

Pancasila bisa menjadi pandangan dunia atau *world of view* yang juga bisa ditanamkan dengan nilai-nilai filosofis. Pancasila merupakan Filsafat bangsa yang benar - benar selaras dengan jiwa bangsa Indonesia . Yang menonjol di sini adalah kapasitas pengetahuan bangsa, misalnya dalam kaitannya dengan hakikat realitas dan kebenaran. Hakikat realitas dan kebenaran serta nilai-nilai filsafat sesungguhnya merupakan bagian dari sudut pandang metafisika, epistemologi, dan aksiologi yang harus di explore oleh filsafat ilmu dalam upaya mengembangkan Pancasila. Sebagai pandangan dunia atau filsafat, dalam upaya mewujudkan

Pancasila. Sebagai falsafah hidup, merupakan acuan intelektual kognitif cara berpikir bangsa, yang dalam usaha keilmuan dapat terbangun ke dalam sistem filsafat yang kredibel. Bahan materialnya adalah berbagai butir dan ajaran kebijaksanaan dalam budaya etnik maupun agama. Penguasaan ilmu pengetahuan di Indonesia harus berpedoman pada keilmuan Pancasila. Pancasila berfungsi sebagai sudut pandang. Hal ini adalah konsekuensi logis dari pendirian teleologis dalam ilmu. Ilmu pengetahuan tidak bebas nilai: ilmu pengetahuan “masuk” ke dalam matriks Pancasila yang berbasis Ketuhanan Yang Maha Esa dan berpuncak pada Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia (Sutrisno, 2006:74).

## B. Pengembangan Nilai-Nilai Pancasila

Pengembangan Nilai-Nilai Pancasila meliputi pemahaman umum sebagai pandangan hidup (*way of life*), pandangan dunia (*weltanschauung*), hidup langsung (*weltdeschauung*), arah hidup (*wereld en levens beschouwing*). Dalam hal ini, Pancasila diperuntukkan sebagai petunjuk hidup yang harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari (Kaelan, 2013:67). Dengan kata lain, Pancasila diharapkan sebagai pedoman bagi seluruh arah semua kegiatan dan kehidupan di segala bidang: Politik, pendidikan, keagamaan, sosial, kemasyarakatan, dan perekonomian. Artinya, ini berarti semua tingkah laku dan tindak tanduk perbuatan manusia Indonesia harus dijiwai dan merupakan pancaran dari semua sila Pancasila. Secara etimologis, sesuai dengan tingkatannya, kata “Pancasila” berasal dari bahasa Sansekerta, India (dialek kasta Brahmana). Menurut Prof. Muhammad Yamin, dalam bahasa Sansekerta perkataan ”Pancasila” ada dua macam arti, yaitu: Panca artinya ‘lima’, sedangkan, syiila berkaitan dengan peraturan tingkah laku yang penting/ baik. Dengan demikian, Pancasila itu memiliki prinsip-prinsip moral dan etika (Kaelan, 2013:18).

Adapun hakikat isi Pancasila adalah sebagai berikut :

1. Ketuhanan Yang Maha Esa, sila pertama ini meliputi dan menjiwai sila-sila kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di dalam sila pertama ini kita harus percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, saling menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama, saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, tidak memaksakan satu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, sila kedua, pada dasarnya diliputi dan dijiwai oleh Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, yang juga menjiwai sila-sila persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Dalam sila kedua, kita harus mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban, saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap tenggang rasa, tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
3. Persatuan Indonesia, sila ketiga ini diliputi dan dijiwai oleh Sila Ketuhanan Yang Maha Esa serta kemanusiaan yang adil dan beradab, meliputi dan menjiwai sila-sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di dalam sila ketiga ini kita harus menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara Indonesia di atas kepentingan pribadi atau golongan, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, cinta tanah air dan bangsa, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber-Bhinneka Tunggal Ika. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, adalah diliputi dan dijiwai oleh sila-sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Persatuan Indonesia, meliputi dan menjiwai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4. Di dalam sila keempat, berarti mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama,

musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan, dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan.

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sila ini diliputi dan dijiwai oleh sila-sila Ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan. Di dalam sila kelima berarti perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan, bersikap adil, menghormati hak-hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum, bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. (Kaelan, 2014:187)

Pancasila juga disebut *weltanschauung* atau pandangan hidup. Nampaknya Pancasila merupakan imperatif pemikiran bangsa, kerangka penghargaan hakiki yang induksinya dibangun dalam kerangka etik dan kerangka legitimasi negara negara, negara kesatuan RI modern. Sebagai pedoman hidup, Pancasila memuat kerangka baku yang bersifat preskriptif bagi kehidupan manusia. Pancasila mengandung standar yang terhormat. Keinginan untuk mempertahankan negara Indonesia harus dilandasi semangat dan aturan yang besar. Pemikiran -pemikiran yang terkandung di dalamnya merangkum kecerdasan masyarakat Indonesia dalam tatanan sosial dan keagamaan yang selama berabad-abad dijadikan standar moral . Komponen kebaikan tercantum dan menjadi pedoman masyarakat Indonesia.

Koento Wibisono menyatakan bahwa untuk mengembangkan Pancasila, pertama harus ada unsur keyakinan. Setiap ideologi selalu memuat konsep-konsep dasar yang menggambarkan seperangkat keyakinan yang diorientasikan kepada tingkah laku para pendukungnya untuk mencapai suatu tujuan yang dicita-citakan. Yang kedua adalah unsur mitos. Setiap ideologi selalu memitoskan ajaran dari seseorang atau “badan” sebagai kesatuan, yang secara fundamental mengajarkan cara bagaimana hal yang ideal itu pasti dapat dicapai. Yang ketiga adalah loyalitas. Setiap ideologi selalu menuntut adanya loyalitas serta keterlibatann optimal para pendukungnya untuk mendapatkan derajat penerimaan optimal. Selain itu, dalam ideologi terkandung juga adanya tiga subunsur, yaitu rasional, penghayatan dan susila (Bakry, 2001:36).

Yang berusaha memberikan premis substansial bagi penjabaran Pancasila secara ilmiah dengan menampilkan sejumlah alasan yang dianggapnya penting. Pertama, dia mengutip apa yang dikatakan oleh Menteri Roeslan Abdulgani pada seminar manipol di Bandung tanggal 28 Januari 1961 bahwa presiden Soekarno menghendaki penarikan ke atas dan penarikan ke bawah ajaran Pancasila (Abdulgani, 1998). Yang dimaksud dengan penarikan ke atas adalah perumusan teori Pancasila, khususnya ke dalam filsafat ilmu yang mengkaji Pancasila. Sedangkan, yang dimaksud dengan penarikan ke bawah adalah tingkat penjabaran dan pelaksanaannya yang boleh disebut sebagai sikap hidup atau *way of life* (Hadi, 1994:30).

Selain itu, Notonagoro juga mengatakan bahwa Pancasila bermanfaat secara epistemologis bagi cara pandang hidup berbangsa dan bernegara. Karena itu, untuk meneruskan manfaat Pancasila sebagai pendirian dan pandangan hidup dalam menentukan sikap dalam kerangka penyelidikan dan penyampaian pandangan dalam ilmu pengetahuan dapat dikemukakan tiga hal penting dan fundamental sebagai pertimbangan, yaitu : kecakapan cipta untuk mencapai kenyataan, sebab-akibat dan hubungan antara ilmu pengetahuan, serta keadaban etika (Edwin, Ferry, 2006:16).

Pengetahuan mengenai Pancasila sebagai dasar filsafat dan asas kerohanian (ideologi) negara Republik Indonesia, sebagaimana halnya pengetahuan yang lain, adalah bertingkat-tingkat. Pengetahuan dapat dibedakan menjadi 4 macam. .

1. Pertama, pengetahuan biasa, *common sense atau good sense* pengetahuan yang dicapai dengan akal sehat oleh orang pada umumnya dalam pengalaman sehari hari.
2. Kedua, pengetahuan ilmiah, pengetahuan yang diperoleh dengan cara analisis. dengan mengorganisasikan dan mensistematisasikan common sense dari pengalaman dan pengamatan.

3. Pengetahuan filsafat, yaitu pengetahuan yang diperoleh daripemikiran bersifat kontemplatif dan spekulatif, menekankan pada universalitas kajian mendalam.
4. Pengetahuan agama, berasal dari Tuhan melalui utusanNya.(Alaby, 2019:20)

Filsafat ilmu sebagai dasar sebuah ilmu pengetahuan (*science of knowledge*) dapat mengembangkan Pancasila dengan tiga cara, yakni ontologi, epistemologi dan aksiologi.

1. Secara ontologi, Pancasila pada hakekatnya adalah sebuah sistem nilai atau prinsip yang mendasari bentuk negara Indonesia. Sebagai nilai atau prinsip dasar, di dalamnya terkandung makna-makna kebijaksanaan reflektif yang menyiratkan idealisasi pada hal yang dianggap baik, benar, indah dan bermanfaat bagi manusia. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, pada dasarnya menegaskan secara ontologi, bahwa manusia hidup di dunia harus selalu bertaqwa dan beriman kepada Tuhan. Sila pertama memiliki makna secara ontologi sebagai sebuah ilmu pengetahuan yang seharusnya dapat dipahami oleh masyarakat dan bangsa Indonesia agar di dalam kehidupan tidak melakukan perbuatan yang tercela dan merugikan orang lain. Dengan mengaktualisasikan nilai Pancasila ke dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan benegara supaya loyalitas warga masyarakat dan warganegara terhadap Pancasila tetap tinggi sehingga apatisme, resistensi terhadap pancasila bisa diminimalisir (Alaby, 2019:188).
2. Secara epistemologis, Pancasila pada mulanya adalah harmonisasi dari paham Barat modern sekuler, paham kebangsaan, Islam dan pelbagai jenis pengetahuan lainnya yang melalui proses perdebatan panjang hingga mencapai titik temu. Kebenaran yang dikandung Pancasila adalah kebenaran konsensus. Watak konsensus berkonsekuensi pada fleksibilitas peninjauan atas konsensus, meskipun jika berubah dalam bentuk yuridis akan memiliki kekuatan mengikat. Pancasila yang mengandung kebenaran konsensus adalah sistem terbuka yang dapat ditafsir dalam pelbagai arti, dinilai kelemahan dan kelebihanannya serta di kontekstualisasi kan dengan semangat perubahan. Pengetahuan yang bersifat kefilosofan mengenai Pancasila memiliki kesesuaian dengan proses tercapainya kesiapan pribadi. Dengan adanya pengetahuan yang bersifat kefilosofan mengenai hakikat Pancasila, itu berarti adanya dasar yang kuat dan kekal untuk terbentuk nya *way of life* negara, bangsa dan warga negara (Edwin, Ferry, 2006:165).

Nilai-nilai Pancasila yang terdiri dari lima sila itu memiliki banyak sumber pengetahuan yang sudah seharusnya mampu diimplementasikan dalam kehidupan manusia, dan dijadikan petunjuk dalam berperilaku. Pengetahuan yang terkandung di dalam Pancasila sesungguhnya sudah cukup untuk mengatasi persoalan kebangsaan dan membawa kemajuan jika ia diterapkan secara original di dalam menjalankan semua aktivitas, tugas negara maupun tugas akademik.

3. Secara aksiologi, Pancasila sebagai pandangan hidup mempunyai nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam silasilanya, yakni nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan dan kerakyatan serta keadilan sosial. Nilai-nilai luhur tersebut sudah seharusnya mampu diserap oleh masyarakat Indonesia. Berpijak dari ketiga aspek dalam filsafat ilmu tersebut, sistem filsafat di dalam nilai-nilai Pancasila mengandung ajaran tentang potensi dan martabat manusia yang merupakan anugerah dari Tuhan. Karena itu, ketika seseorang mampu menghayati dan menjwai nilai-nilai budi pekerti dari Pancasila, besar kemungkinan masyarakat Indonesia akan lebih baik dalam berperilaku sehingga apa yang dicita-citakannya akan tercapai serta menjadikan jati diri bangsa Indonesia lebih bermartabat.

Kerap para ilmuwan mengembangkan Pancasila menggunakan “pisau filsafat ilmu”. Ia menghampiri Pancasila dari jendela filsafat, meminjam pelbagai perspektif di dalam teori-teori filsafat dalam rangka membedah hakikat Pancasila. Satu-satunya jalan untuk meluruskan, atau untuk memberi porsi layak bagi batas-batas pengertian, kajian ilmiah filosofis diyakini dapat menghantarkan masyarakat Indonesia dan

dinamika kenegaraan pada nilai hakiki Pancasila. Filsafat sebagai ilmu yang berkerangka komprehensif, radikal, koherensi diyakini dapat menggali unsur-unsur paling inti dari Pancasila (Edwin, Ferry, 2006:145)

Dengan mengungkapkan nilai-nilai Pancasila secara filosofis, diharapkan akan muncul informasi-informasi baru dan kemajuan nilai-nilai luhur Pancasila yang belum terpakai. Berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila diharapkan dapat memotivasi masyarakat Indonesia untuk tabah dan tegar serta handal dalam menyerap dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, menjadi tugas seorang peneliti untuk dapat membantu dan menerapkan pembelajaran nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Pancasila merupakan bagian dari falsafah bangsa Indonesia yang hendaknya mempunyai moral dan nilai-nilai luhur untuk terus dilaksanakan di perguruan tinggi agar ajaran dan nilai-nilai Pancasila tidak hanya sekedar pencitraan dan dijadikan instrumen antarmuka politik. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan Pancasila agar tidak dijadikan sebagai alat penghubung politik, dan tidak menyebabkan masyarakat Indonesia menjadi terpisah, maka masyarakat Indonesia harus mampu menempatkan falsafah Pancasila sebagai suatu sistem ilmu pengetahuan. sehingga upaya untuk mendisintegrasi paham-paham negatif terhadap ideologi Pancasila semakin bisa dilakukan.

Bagaimana pun juga, bangsa Indonesia harus mampu menempatkan kendali dasar imajinasi manusia terhadap nilai-nilai Pancasila. Apabila Pancasila tidak didukung oleh orang-orang yang sadar dan terdidik serta peneliti-peneliti yang handal, serta para pelajar yang duduk di bangku kuliah, maka nilai-nilai Pancasila akan menjadi kabur, terpecah belah dan dapat terjerumus ke dalam kemacetan dan kebekuan yang membandel, kemiskinan konseptual. akibat dari langkanya pemikiran-pemikiran baru secara filsafati yang menegaskan bahwa hakikat bangsa itu adalah “*asas kerohanian/asas kejiwaan yang lahir dari suatu solidaritas besar dan dikuatkan oleh keinginan untuk tetap hidup bersama (l desir de vivre ensemble)*”. Ditambahkannya bahwa hakikat suatu bangsa tidak cukup kuat apabila hanya didasarkan pada kesamaan ras, agama, ataupun bahasa (Wibisono Siswomihardjo, 1995:132).

Filsafat, sebagai sebuah pengetahuan sudah seharusnya mampu mengembangkan nilai-nilai Pancasila, dengan jalan dijadikan bahan dan kurikulum dalam pendidikan di Indonesia. Dengan begitu, masyarakat harus memahami bahwa Pancasila yang memiliki nilai-nilai luhur itu adalah sifat-sifat dan karakter yang sesuai dengan bangsa Indonesia. Karena itu, perguruan tinggi harus mampu mengembangkan dan menanamkan sejak dini di dalam pikiran masyarakat Indonesia. Filsafat ternyata pengetahuan yang sangat mendasar bagi setiap pengembangan ilmu.

Oleh karena itu sudah seharusnya jika ia dijadikan dasar bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Sebab dalam filsafat itulah kita dapat mengetahui bagaimana hakikat ilmu pengetahuan. Karena itu, Pancasila sebagai ilmu pengetahuan sudah seharusnya juga dikembangkan di dalam struktur masyarakat, bahkan mulai dari tingkat lapisan terendah sampai pada lapisan tingkat tertinggi dan bahkan pada tingkat pejabat tinggi negara. Sehingga dengan memberikan penanaman kembali esensi dan ontologi Pancasila, epistemologi Pancasila, aksiologi Pancasila, dapat dijadikan pedoman hidup bagi bangsa Indonesia dan umat manusia.

Di sisi lain, dalam konteks keilmuan di dalam akademik, pemahaman dan pengembangan terhadap Pancasila sesungguhnya sangat relevan dengan filsafat ilmu yang menekankan pada pengetahuan ilmiah, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Hal ini dapat dilakukan oleh seorang ilmuwan dan akademisi dan bahkan itu menjadi tanggung jawab mereka untuk melakukan pengembangan Pancasila melalui jalur akademik.

Dan langkah-langkahnya dapat berupa pengajaran dalam lembaga pendidikan formal, seminar, penelitian atau juga penyusunan karya ilmiah. Oleh karena itu, pengembangan Pancasila secara terus menerus melalui jalur keilmuan itu akan berdampak signifikan. Pancasila dapat memberikan sumbangsih dalam tingkat perguruan tinggi.

Penerapan filsafat ilmu secara berkelanjutan ke dalam pengembangan Pancasila merupakan kekyayaan yang penting, sebagaimana juga pernah diisyaratkan oleh Bung Karno bahwa Pancasila harus ditarik ke atas,

pada tingkat ilmiah. Tugas ini harus dilakukan di tingkat perguruan tinggi. Tetapi, juga dapat dilakukan oleh komunitas dan media pendidik yang perlu diangkat ke dalam diskusi publik.

### C. Pengembangan Nilai-Nilai Pancasila dalam mengatasi krisis kebangsaan

Upaya dalam pengembangan Nilai Pancasila dalam mengatasi krisis kebangsaan diperlukan beberapa faktor, yakni:

1. Harus ada penanganan yang penuh kesadaran terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang mempunyai banyak implikasi bagi kehidupan umat manusia. Kehati-hatian dapat dilakukan tidak hanya kepada masyarakat tetapi terlebih lagi kepada penyelenggara negara dengan memberikan penyuluhan bahwa Pancasila sebagai pedoman hidup harus terus menerus dicantumkan dalam setiap pengambilan kebijakan pemerintah agar perilaku yang menyimpang dan merendahkan martabat dapat dikurangi. Pengetahuan sebagai kesadaran (*consciousness*) dan kerjasama cipta, rasa, karsa menimbulkan disiplin kehendak kejiwaan (sesuai dengan pem bawaan karsa kejiwaan untuk berbuat baik) atau wajib melaksanakan pengetahuan yang kebenarannya/ kenyataannya telah dipastikan oleh cipta rasa dan telah sesuai dengan rasa keindahan kejiwaan. Pengetahuan tentang Pancasila sebagai kesadaran ideologis menimbulkan wajib ideologis (Edwin, Ferry, 2006:157). Pemahaman Pancasila sebagai kesadaran dapat membawa pada kelanjutan perubahan jati diri dan jiwa manusia.

2. Memperbaiki pola pikir penyelenggara negara agar tidak terus-menerus melakukan perbuatan merendahkan martabat bangsa dengan cara terus menanamkan nilai-nilai Pancasila, serta memberikan pengetahuan mengenai nilai-nilai Pancasila yang akan menambah pengalaman dan peresapan penghayatan pengetahuan seseorang tentang Pancasila ke dalam mentalitasnya, dan budi hati nuraninya.

3. Menanamkan nilai-nilai Pancasila ke dalam jiwa. Jika suara hati tidak memiliki kepedulian dan kasih sayang terhadap nilai-nilai luhur dari ontologi Pancasila, maka sulitlah untuk mengeksekusi makna Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, yang harus dibina adalah hati nurani manusia agar perwujudan nilai-nilai Pancasila tidak hanya dilakukan melalui proporsi dan pertimbangan manusia, melainkan terlalu menyentuh suara hati manusia. Pancasila menjadi ciri kehadiran manusia sebagai manusia yang terpisah dari keadaan konkritnya. Untuk menunjukkan “akses” ke arah Pancasila, Driyarkara memulai dengan eksistensi manusia yang cara mengadanya ialah ada bersama dalam “Aku-Engkau”, dan bukan antara “Aku-Engkau” (Sutrisno, 2006:76). Selanjutnya, apabila nilai-nilai Pancasila menjadi ciri khas manusia, kemungkinan besar permasalahan kebangsaan dapat terselesaikan.

Proses Pengetahuan tentang Pancasila dimulai saat seseorang mulai mengerti keberadaan cipta, rasa dan karsa yang dimilikinya. Saat ketiga unsur tersebut mulai bekerja sama dalam kesatuan yang bulat dan menyeluruh meliputi perinciannya dalam memandang, menilai dan menyelesaikan masalah yang dihadapinya, saat itulah Pancasila (sebagai pengetahuan) mulai terbentuk dalam dirinya (Edwin, Ferry, 2006:144).

Pengetahuan tentang Pancasila tidaklah cukup berkedudukan di luar, akan tetapi harus dapat menyatu dengan pribadinya, terjelma sebagai sifat, sebagai suasana yang meliputinya dengan mutlak, sampai-sampai dialami sebagai mentalitas, sebagai watak insan kamil di dalam seluruh jiwa dan pikiran manusia. Notonagoro menyatakan bahwa dalam keseharian pengetahuan yang dimiliki seorang manusia tidak menjamin keberadaannya sebagai pelaksana aktif atas pengetahuan tentang nilai-nilai Pancasila yang dimilikinya.

Oleh karena itu, diperlukan rasa atau kesiapan dalam menerapkan pengetahuan nilai-nilai Pancasila. Karena dengan adanya kemauan, maka kapasitas tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat dan negara Indonesia. Dengan demikian, kebutuhan bangsa saat ini dan masa depan dalam menanggulangi permasalahan di bidang sosial, politik, ekonomi, dan sosial adalah memberikan pemahaman nilai-nilai Pancasila yang komprehensif dan filosofis dalam rangka pemenuhan klarifikasinya di kalangan elite politik, penguasa negara, dan birokrat.

Mereka perlu dididik mengenai nilai-nilai Pancasila agar mereka tidak melakukan praktek korupsi dan kecurangan lainnya di dalam sistem demokrasi Indonesia. Pancasila adalah sistem ajaran bangsa Indonesia dalam menjalani kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Bangsa Indonesia meyakini kebenaran nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai pedoman berpikir dan bertindak. Karena itu, setiap manusia yang ingin melakukan tindakan harus bercermin pada nilai-nilai Pancasila terlebih dahulu. Pancasila sebagai norma fundamental berfungsi sebagai suatu cita-cita atau ide yang harus diwujudkan menjadi suatu kenyataan. Wujud Pancasila secara kongkret merupakan perwujudan Pancasila dalam setiap perbuatan, tingkah laku dan sikap hidup sehari-hari (Widjaja, 2004).

Untuk merealisasikan pengamalan Pancasila dalam upaya mengatasi Krisis kebangsaan di Indonesia, maka pengamalan Pancasila dapat dilakukan di jalur pendidikan. Pertama, dengan memberikan pengetahuan, pengetahuan biasa, pengetahuan ilmiah dan pengetahuan filsafat tentang Pancasila. Hal ini sangat penting terutama bagi para pemimpin, dan ilmuwan. Kedua, dengan kesadaran, melalui sikap yang sadar dan mengetahui pertumbuhan keadaan yang ada dalam diri sendiri akan membantu seseorang untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Ketiga, dengan ketaatan, yaitu selalu dalam keadaan sedia untuk memenuhi wajib lahir dan batin, lahir berasal dari luar misalnya dari pemerintah, batin dari diri sendiri. Keempat, kemampuan yang cukup kuat, pendorong untuk melakukan perbuatan yang sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Kelima, mawas diri, yakni dengan selalu menilai diri sendiri apakah dirinya berbuat baik atau buruk dalam melaksanakan Pancasila (Kaelan, 2014:178).

Setiap warga negara Indonesia sudah seharusnya mendasarkan cipta, rasa, karsa dan karya atas nilai-nilai Pancasila. Pada hakikatnya, sebagaimana dikatakan Notonagoro, memiliki pengetahuan dan ilmu mengenai Pancasila pun belum cukup. Oleh karena itu, hal yang penting adalah mengetahui, kemudian meresapi, menghayati dan akhirnya mengamalkan Pancasila dalam setiap aspek kehidupan umat manusia. Pancasila sebagai kepribadian bangsa yang merupakan perwujudan dari jiwa bangsa dalam sikap mental dan tingkah laku adalah dasar filsafat hidup, ideologi, dan moral negara yang harus dikembangkan sesuai dengan kodrat manusia.

Wawasan pengetahuan dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila telah lama mengakar dan hidup dalam jiwa, hati, watak, jati diri, dan afiliasi individu Indonesia yang tercermin dalam tradisi, kecenderungan, tingkah laku, dan pola asuh masyarakat.

Lima nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila merupakan inti kehidupan dalam kebudayaan bangsa, serta tuntutan dan tujuan hidupnya, serta menjadi landasan seluruh kehidupan bangsa Indonesia. Dengan kata lain, pada hakikatnya etika, etika negara Indonesialah yang mengikat seluruh warga negara, baik sebagai individu maupun sebagai solidaritas nasional. Pancasila merupakan etika dan etika negara Indonesia dalam arti sebagai pusat bersama dari berbagai moral yang benar-benar terdapat di Indonesia.

Negara Indonesia mempunyai etika yang berbeda-beda ditentukan dari agama, keyakinan, dan tradisi. Masing-masing etika tersebut mempunyai coraknya masing-masing, berbeda satu sama lain dan diterapkan pada kelompok yang bersangkutan. Bagaimanapun, dalam etika tersebut terdapat unsur-unsur umum yang bersifat umum dan mengatasi segala macam pemahaman. Dengan demikian, terlihat bahwa etika Pancasila melampaui segala batasan dan bersifat nasional. Pancasila merupakan lima standar etika yang penting untuk dibangun sebagai landasan negara. karenanya, nilai-nilai Pancasila yang terlebih lagi mempunyai ilmu pengetahuan dari sudut pandang ontologi, epistemologi, dan aksiologi harus dapat dijadikan landasan landasan dalam upaya mengembangkan Pancasila dan mengatasi permasalahan negara Indonesia saat ini.

## **KESIMPULAN**

Dapat disimpulkan bahwa keberadaan filsafat ilmu sangat penting kegunaan keilmuannya dalam rangka mengatasi krisis nasional yang seiring dengan melemahnya pemahaman masyarakat terhadap nilai - nilai

Pancasila . Melemahnya pemahaman dan penghayatan masyarakat dapat diatasi melalui perbaikan untuk mengembalikan fungsi dan menegaskan kembali nilai Pancasila . Dalam kerangka ini Pancasila memegang nilai bahwa hakikat ilmu dan pengetahuan dapat dibuktikan melalui filsafat ilmu. Pertama , secara ontologis Pancasila mempunyai ajaran dan nilai-nilai luhur seperti peran Tuhan Yang Maha Esa dalam membimbing umat manusia dan penanaman toleransi , saling menghormati, dan cinta kasih terhadap sesama manusia.

Kedua, Pancasila mempunyai epistemologi, sumber ilmu pengetahuan dan wawasan kebangsaan yang patut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, dari sudut pandang pragmatis , nilai-nilai Pancasila memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kehidupan manusia . Nilai - nilai luhur gotong royong dan rasa keadilan sosial harus diwujudkan dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Pengembangan nilai-nilai Pancasila selanjutnya dapat dilakukan dalam filsafat ilmu. Dalam konteks ini, para ilmuwan dan cendekiawan berperan sangat penting sebagai perantara untuk memahami evolusi nilai- nilai Pancasila dalam menghadapi krisis nasional . Kebebasan mimbar dan kebebasan akademik dikembangkan secara bertanggung jawab, seiring dengan tinjauan filosofis dalam mengembangkan Nilai-nilai Pancasila oleh para akademisi.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdulgani, R. (1998). *Pancasila Perjalanan Sebuah Ideologi*. Jakarta: Lp3es.
- Ahmad Tafsir. (2005). *Filsafat Ilmu Mengurai Ontologi, Epistemologi Dan Aksiologi Pengetahuan*. Jakarta: Pt.Remaja Rosdakarya.
- Alaby, M. A. (2019). *Filsafat Ilmu*. Aceh: Cv Bunda Ratu.
- Alaby, M. A. (2019). Membumikan Nilai Pancasila Pada Generasi Bangsa. *Gema Wiralodra*, 10(2). <https://doi.org/10.31943/Gemawiralodra.V10i2.75>
- Bakry, N. M. (2001). *Orientasi Filsafat Pancasila*. Liberty: Yogyakarta.
- Edwin, Ferry, Dkk. (2006). *Prof. Notonagoro Dan Pancasila: Analisis Tekstual Dan Kontektual*. Yogyakarta: Ugm Press.
- Gie, T. L. (2007). *Pengantar Filsafat Ilmu*. Yogyakarta: Liberty.
- Hadi, H. (1994). *Hakikat Dan Muatan Filsafat Pancasila*. Yogyakarta: Kanisius.
- Icw. (N.D.). Antikorupsi.Org. Retrieved From <https://Antikorupsi.Org/Id>
- Kaelan. (2013). *Negara Kebangsaan Pancasila , Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis Dan Aktualisasinya*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kaelan. (2014). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Sutrisno, S. (2006). *Filsafat Dan Ideologi Pancasila*. Yogyakarta: Andi Press.
- Wibisono Siswomihardjo, K. (1995). *Peran Filsafat Dalam Hidup Berbangsa, Dalam Alex Lanur (Ed), Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka: Problem Dan Tantangannya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Widjaja. (2004). *Penerapan Nilai-Nilai Pancasila Dan Ham Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.